



Proses penangkapan WNA bermasalah di kantor Imigrasi (ilustrasi) (Foto: Arif Rahmas Suryaman)

Penegakan Hukum Keimigrasian Meningkat, OPERASI KEIMIGRASIAN DIGALAKKAN

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menyerukan penggalakan operasi keimigrasian tingkat wilayah kerja dan nasional. Keamanan nasional menjadi fokus keimigrasian seiring dengan dinamika geopolitik dunia saat ini.

■ Penulis: Elyan Nadian Zahara

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencatatkan kenaikan jumlah penegakan hukum keimigrasian. Sepanjang Januari s.d. Mei 2024, jajaran Imigrasi di seluruh Indonesia telah memberlakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap 1.761 warga negara asing (WNA) atau rata-rata sebanyak 352 orang setiap bulannya. Jumlah ini meningkat 94,4% dibandingkan jumlah TAK tahun sebelumnya, yakni rata-rata sekitar 181 TAK per bulan atau sebanyak 2.174 TAK sepanjang tahun 2023.

"Imigrasi harus *balance*. Di satu sisi kita upayakan bagaimana tugas (tugas-ringsi) fasilitator pembangunan ekonominya jalan dengan banyak mendatangkan orang asing berkualitas. Di sisi lain, kita tetap waspada. Tidak

boleh lengah. Kita giatkan operasi, turun [lakukan] pengawasan, baik itu pengawasan darat maupun laut, di bandara maupun pelabuhan," Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim menjelaskan pada Kamis (13/6).

Hingga Mei 2024, Imigrasi melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian juga telah melakukan 52 penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap orang asing. Sementara itu, pada periode yang sama, Imigrasi telah melakukan penangkalan atau pelarangan masuk terhadap 3.626 orang asing.

Dinamika geopolitik negara-negara di dunia saat ini berdampak secara tidak langsung pada keamanan Indonesia melalui tingginya lalu lintas orang asing. Hal ini pun menjadi fokus

Imigrasi terkait dengan pengawasan orang asing.

Awal Mei lalu, Imigrasi melalui operasi pengawasan orang asing Jagratara menjangkit 914 orang asing untuk diperiksa. Operasi tersebut menjadi bentuk kewaspadaan Imigrasi terhadap potensi pelanggaran yang ditimbulkan dari aktivitas orang asing di seluruh Indonesia.

"Mei lalu kami lakukan Operasi Jagratara. Ke depannya sudah saya serukan untuk menggiatkan operasi serupa, baik dalam skala lokal—seperti Bali Becik—maupun skala nasional. Ini untuk membantu menjaga stabilitas keamanan nasional, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap Imigrasi," Silmy menuturkan.

Lebih lanjut, Silmy menambahkan, "Kita harus sigap dan waspada. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya mendatangkan manfaat untuk Indonesia malah kontraproduktif bagi negara." ■